

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : SOTK Kembali Dirombak
Entitas / Cakupan : Kota Cimahi
Sumber / Hal : Galamedia/Hal.6
Edisi : Rabu, 18 April 2018

SOTK Kembali Dirombak

■ Bakal Terbantur Kebutuhan SDM dan Anggaran

D. HARDJAKUSUMAH, (GM).-

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi akan mengevaluasi susunan organisasi tata kerja (SOTK) baru yang sudah diterapkan sejak awal tahun 2017. Kebijakan itu diambil lantaran ada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani lebih dari satu bidang.

Perubahan SOTK yang pertama, ada SKPD yang dipecah dan naik tingkat. Hasil dari perubahan SOTK menjadi 15 dinas, 4 badan, 3 kecamatan ditambah kesbang, inspektorat, setwan, dan setda.

Selain itu, ada pula dinas baru hasil pecahan dari dinas lama di antaranya Dinas Komunikasi Informasi Arsip dan Perpustakaan,

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi, Yulia Fitri menjelaskan perubahan SOTK mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

"Kita akan evaluasi SOTK secepatnya. Evaluasi itu memang diperlukan untuk penyesuaian juga," kata Yulia didampingi Kasubag Kelembagaan, Rina Erlina, saat ditemui di kompleks Pemkot Cimahi, Jalan Hardjakusumah, Selasa (17/4).

Diakuinya, memang sejauh ini sudah ada SKPD yang mengusulkan untuk dipecah kembali. Seperti Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2KBP3A).

Namun, kata dia, peleburan SKPD tentunya bukanlah perkara mudah. Pasalnya, selain prosesnya panjang dan butuh pengkajian, ada juga sisi lain yang mesti dipikirkan.

Di antaranya kemampuan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Pemkot Cimahi. Sebab, SDM yang dimiliki saat ini saja masih kurang. Buktinya, hingga saat ini masih ada be-

berapa SKPD yang belum memiliki kepala dinas.

"Prosedurnya panjang, ini tidak gampang, perlu kajian. Kalau memungkinkan berpisah ya silakan asal sepanjang itu sesuai dengan aturan," ujar Yulia.

Dilebur

Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2KBP3A) Kota Cimahi, Erick Yudha menilai dinasnya perlu dilebur kembali. Dinsos P2KBP3A terbagi dalam tiga bidang, yakni Bidang Sosial, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Bidang Pember-

dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurut Erick, alangkah lebih efektif bila Bidang Sosial dipecah lagi menjadi Dinas Sosial. Pasalnya, bagian Sosial itu merupakan urusan dasar untuk penanganan masalah sosial di Cimahi. "Alangkah baiknya dipisah. Akan lebih efektif untuk penanganan kesejahteraan sosial, jadi cakupannya tidak terlalu luas," katanya.

Namun, peleburan dinas yang dibawahnya itu tergantung pada kemampuan anggaran dan sumber daya yang dimiliki Pemkot Cimahi. "Pada akhirnya memang bergantung pada kemampuan keuangan pemerintah dan ketersediaan SDM," tandasnya. **(wis)****